

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Upaya menuju bangsa Indonesia yang mandiri dan berdaya saing tinggi tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya dengan program pendidikan nasional, pendidikan menjadi salah satu kunci sukses dari kemajuan bangsa dan negara-negara yang ada di dunia. Pendidikan menjadi hak bagi seluruh warga Indonesia seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Dengan apa yang tertuang di undang-undang maka pemerintah membuat sistem pendidikan nasional, yang mana sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

Guru merupakan salah satu komponen dalam sistem pendidikan nasional, mempunyai peran utama dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional. Itu semua dikarenakan sosok gurulah yang bersinggungan secara langsung dengan objek pendidikan yaitu para peserta didik dan segala komponen-komponen pendukung kegiatan pembelajarannya. Guru merupakan personil sekolah yang memiliki kesempatan untuk bertatap muka lebih banyak dengan siswa dibandingkan dengan personil sekolah lainnya. Oleh sebab itu, pesan dan tanggung jawab guru dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling disekolah sangat diharapkan.

Dilihat dari sisi aktualisasinya, pendidikan merupakan proses interaksi antara guru dengan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Pendidikan, peserta didik, dan tujuan pendidikan merupakan komponen utama pendidikan. Ketiganya membentuk suatu triangle, yang jika hilang salah satunya, maka hilanglah hakikat

pendidikan. Namun demikian dalam situasi tertentu tugas guru dapat diwakilkan atau dibantu oleh unsur lain seperti media teknologi, tetapi tidak dapat digantikan. Mendidik adalah pekerjaan profesional. Oleh karena itu guru sebagai pelaku utama pendidikan merupakan tenaga pendidik profesional. Profesi guru sangat identik dengan peran mendidik seperti membimbing, membina, mengasuh ataupun mengajar.

Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan, menyatakan bahwa pada jenjang pendidikan dasar harus tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 28 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, jumlah tersebut belum termasuk dengan guru bidang studi, yakni guru penjaskes dan guru agama. Kriteria ini merupakan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi dalam pengelolaan pendidikan. Dengan adanya kebijakan tersebut maka setiap sekolah harus memenuhi kebutuhan guru sekolah dasar sesuai dengan apa yang telah tertulis di peraturan yang berlaku. Namun dalam hal realitasnya masih banyak di sekolah-sekolah dengan guru yang mengemban multi jabatan, seperti guru kelas yang juga sekaligus menjadi guru olahraga, dikarenakan keterbatasan guru yang tersedia di sekolah. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam hal pembelajaran dikarenakan salah satunya akan ada yang di korbakan. Kualitas dan kuantitas guru haruslah seimbang komposisinya.

(Anwar, 2018) Pada era otonomi pendidikan, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang sangat besar bagi penentuan kualitas guru yang diperlukan di daerahnya masing-masing. Oleh karena itu di masa mendatang, daerah benar-benar harus memiliki pola rekrutmen dan pola pembinaan karir guru secara tersistem agar terciptanya profesionalisme pendidikan di daerah. Dengan pola rekrutment dan pembinaan karir guru yang baik, akan tercipta guru yang profesional dan efektif.

Permasalahan guru dalam sistem pendidikan di Indonesia terbilang kompleks, mulai dari masalah kekurangan guru, pemerataan guru, kesejahteraan guru, kualitas dan lain sebagainya. Dalam kajian yang berkaitan dengan pendidikan, guru selalu menjadi pusat perhatian. Perhatian luas terhadap keberadaan guru menandakan bagaimana sentralnya peran guru dalam menjalankan roda sistem pendidikan nasional.

Peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil merupakan bentuk respon yang tepat terhadap penataan dan pendistribusian guru yang

selama ini sulit dilakukan, terutama antar kabupaten dalam provinsi dan distribusi guru antar kota/kabupaten antar provinsi. Melalui peraturan bersama yang dibuat oleh lima menteri ini, memerintahkan kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota sesuai dengan kewenangannya untuk membuat perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan yang menjadi tanggung jawab masing-masing wilayah.

Tentunya agar pemerataan guru terlaksana secara merata diperlukan perencanaan yang baik, Pendekatan perencanaan merupakan serangkaian asumsi yang dapat digunakan sebagai langkah strategi dan bahan pertimbangan dalam menentukan skala prioritas dalam perencanaan pendidikan. *Social demand* adalah pendekatan perencanaan pendidikan yang didasarkan atas tuntutan atau kebutuhan sosial akan pendidikan. Pendekatan ini menekankan pada tujuan pendidikan yang mengandung misi pembebasan masyarakat dari kebodohan dan kemiskinan (Somantri, 2014). Pendekatan *social demand* atau pendekatan sosial ini mengutamakan pemenuhan layanan pendidikan sebagai kebutuhan dasar masyarakat. Pendekatan *social demand* merupakan suatu pembangunan pendidikan dengan lembaga-lembaga dan fasilitas demi memenuhi tekanan-tekanan untuk memasukan sekolah serta memungkinkan pemberian kesempatan kepada pemenuhan keinginan masyarakat akan pendidikan (Syamsudin, 2011).

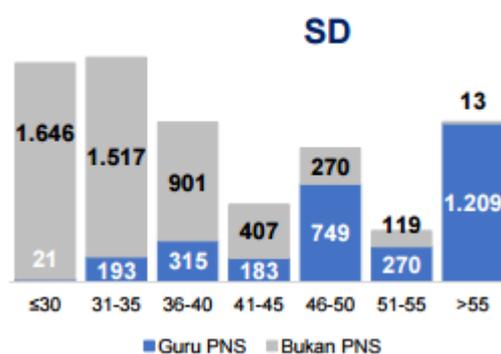
Kabupaten Sukabumi merupakan kabupaten terbesar pertama di Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 47 kecamatan dengan total luas wilayah 4.145 KM<sup>2</sup> dengan wilayah terluas berada di kecamatan Ciemas dan wilayah terkecil berada di kecamatan kebonpedes (BPS, 2019). Berdasarkan data jumlah penduduk tahun 2019, penduduk kabupaten Sukabumi sebanyak 2.571.890 jiwa, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2017, pertumbuhan penduduk kabupaten Sukabumi mengalami peningkatan sebesar 0,007 persen dan diperkirakan akan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meningkatnya jumlah penduduk akan berdampak besar terhadap kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Semakin banyak jumlah penduduk usia sekolah, maka kebutuhan pendidikan pun ikut meningkat. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka kebutuhan akan sarana dan prasarana pendidikan pun bertambah.

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen) per April 2020, terdapat 1.214 sekolah dasar di Kabupaten Sukabumi. Data dari (Dapodikdasmen) menunjukkan bahwa dari seluruh sekolah dasar di kabupaten Sukabumi terdapat 8.478 rombongan belajar. Jumlah sekolah sangat berkaitan dengan jumlah guru.

Suatu kecamatan dengan jumlah sekolah yang banyak, akan memerlukan jumlah guru yang banyak pula, karena setiap rombongan belajar harus memiliki minimal satu orang guru kelas.

Guru di kabupaten sukabumi berdasarkan Neraca Pendidikan Nasional yang di unggah oleh kemendikbud memperlihatkan guru menurut usia yang dimana pada usia kurang dari 30 tahun untuk guru PNS sebanyak 21 orang dan guru nonPNS sebanyak 1.646 orang (dapat dilihat di gambar 1.1), kemudian jumlah guru di rentang 31-35 tahun untuk guru PNS sebanyak 193 orang dan untuk guru nonPNS sebanyak 1.517 disini menunjukkan ketidak seimbangan antara guru PNS dan nonPNS yang tersebar di sekolah-sekolah kabupaten Sukabumi. Terlebih lagi melihat angka guru PNS dengan usia diatas 55 tahun sebanyak 1.209 orang, yang dimana dengan usia tersebut masa bakti guru akan berakhir (pensiun). Kekhawatiran akan kekurangan guru di kabupaten Sukabumi kian jelas, melihat dari meningkatnya jumlah penduduk yang mempengaruhi kepada kondisi penduduk usia sekolah, kemudian banyaknya sekolah yang tersebar di 47 kecamatan yang berada di kabupaten Sukabumi dengan rombongan belajar yang tidak sedikit, dan angka guru yang sebentar lagi akan pensiun.

## GURU MENURUT USIA



Gambar 1.1 Sumber: Data Verifikasi PDSPK dan Ditjen GTK, November 2019

Dengan demikian, untuk mengetahui kebutuhan guru kelas, guru penjaskes dan guru agama yang sesuai dengan standar nasional pendidikan tersebut, maka perlu dilakukan analisis perencanaan dengan menggunakan pendekatan *social demand* sesuai dengan aspek demografi dan kewilayahan.

Penelitian ini, mengintegrasikan antara pendekatan *social demand* dengan laju pertumbuhan penduduk kabupaten sukabumi sehingga dapat menyesuaikan dalam perencanaan kebutuhan guru dimasa yang akan datang agar terpenuhi secara merata.

Dengan apa yang telah dijabarkan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kebutuhan Guru Sekolah Dasar di Kabupaten Sukabumi

guna memenuhi dan pendistribusian guru secara merata untuk lima tahun kedepan periode tahun 2020 hingga tahun 2025.

## 1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, masalah dalam penelitian ini mengarah pada pendistribusian tenaga pendidik ke sekolah. Secara konseptual penelitian ini dilakukan untuk mengetahui analisis kebutuhan guru Sekolah Dasar di Kabupaten Sukabumi dengan mengimplementasikan pendekatan *social demand* dalam perencanaan pendidikan.

Adapun secara kontekstual, penelitian ini dilakukan di instansi negeri yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi. Sedangkan masalah yang akan dikaji dapat dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah angka pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sukabumi?
2. Bagaimanakah angka proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi?
3. Bagaimanakah angka proyeksi usia sekolah dasar di Kabupaten Sukabumi?
4. Bagaimanakah kebutuhan jumlah rombongan belajar di Kabupaten Sukabumi?
5. Berapakah jumlah guru yang dibutuhkan berdasarkan proyeksi penduduk?
6. Berapakah jumlah guru sekolah dasar yang harus di rekrut oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi?

## 1.3. Tujuan Penelitian

### 1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan secara umum dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis ketersediaan guru Sekolah Dasar yang dibutuhkan melalui pendekatan *social demand* pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi.

### 1.3.2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus di penelitian ini adalah untuk :

1. Teridentifikasinya angka pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sukabumi.
2. Teridentifikasinya angka proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi.
3. Teridentifikasinya angka proyeksi usia sekolah dasar di Kabupaten Sukabumi.
4. Teridentifikasinya kebutuhan jumlah rombongan belajar di Kabupaten Sukabumi.

5. Teridentifikasinya jumlah guru yang dibutuhkan berdasarkan proyeksi penduduk.
6. Teridentifikasinya jumlah guru sekolah dasar yang harus di rekrut oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Secara teoritis
  - a. Memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ilmu di bidang administrasi pendidikan, khususnya perencanaan pendidikan.
  - b. Sebagai rujukan secara konsep terhadap perencanaan pendidikan khususnya di jenjang sekolah dasar.
  - c. Dapat dijadikan model dalam pengembangan perencanaan pendidikan terutama analisis kebutuhan guru.
2. Secara praktis
  - a. Menjadi masukan bagi instansi terkait dan berwenang, sebagai acuan dalam perhitungan kebutuhan guru.
  - b. Sebagai acuan bagi instansi terkait dan berwenang dalam mengambil kebijakan yang berhubungan kaitannya dengan kebutuhan guru terutama sekolah dasar pada tahun yang akan mendatang.
  - c. Bagi peneliti untuk menambah pengalaman dan pengembangan ilmu administrasi pendidikan dalam bidang perencanaan pendidikan.

#### **1.5. Struktur Organisasi Tesis**

Tesis ini terdiri dari enam bab, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Bab I Pendahuluan, terdiri atas latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi tesis.
- 2) Bab II Tinjauan Pustaka, terdiri dari kajian pustaka yang berisikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian serta alur proses penelitian.
- 3) Bab III Metode Penelitian, berisikan tentang metodologi penelitian yang menguraikan waktu dan tempat penelitian, fokus penelitian, metode dan pendekatan

penelitian yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta pedoman pengumpulan data.

- 4) Bab IV Hasil dan Pembahasan, menjelaskan hasil dari perhitungan penelitian dan pembahasan yang dilakukan serta menganalisis hasil sesuai dengan konsep yang relevan.
- 5) Bab V Penutup, yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian, berisikan poin-poin penting dari penelitian serta saran.